

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(Studi Pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2015-2018)**

(Skripsi)

Oleh

Fadela Dwi Aprilia Putri



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX (Studies in Districts / Cities in Eastern Indonesia 2015-2018)

By

FADELA DWI APRILIA PUTRI

The purpose of this study was to determine the effect of Poverty Level, Economic Growth, Education Function Spending, Health Function Expenditure, and Capital Expenditure on the Human Development Index in Districts / Cities in Eastern Indonesia.. The data used is secondary data with the sampling technique used is purposive sampling and the number of samples that meet the criteria is 156 districts / cities. The results of statistical tests show that the Poverty Level has a negative and significant effect on HDI, Economic Growth has no effect on HDI, Education Function Expenditures have a positive and significant effect on HDI, Health Function Expenditures have a negative effect on HDI, and Capital Expenditures have no effect on HDI in Eastern Indonesia .

Keywords: *Human Development Index, Poverty Level, Economic Growth, Education Function Expenditure, Health Function Expenditure, Capital Expenditure, Eastern Indonesia Region.*

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2015-2018)

Oleh

FADELA DWI APRILIA PUTRI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 156 Kabupaten/Kota. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM, Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh negatif terhadap IPM, dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan, Belanja Modal, Kawasan Timur Indonesia.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(Studi Pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2015-2018)**

**Oleh
FADELA DWI APRILIA PUTRI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

**Pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGKAT INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA.
(Studi Pada Kabupaten/Kota di Kawasan
Timur Indonesia (KTI) 2015-2018)**

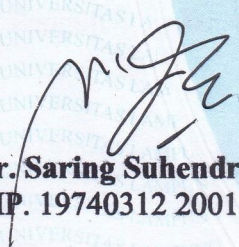
Nama Mahasiswa : **Fadela Dwi Aprilia Putri**

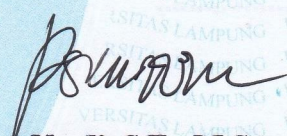
Nomor Pokok Mahasiswa : **1611031066**

Program Studi : **S1 Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing


Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIP. 19740312 200112 1 003


Pigo Nauli, S.E., M.Sc.
NIP. 19820623 200812 1 001

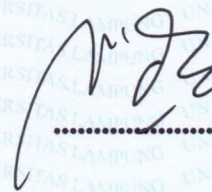
2. Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19751026 200212 2 002

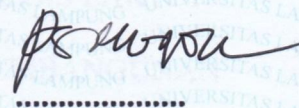
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.



Sekretaris : Pigo Nauli, S.E., M.Sc.



Penguji : Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Ak., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Desember 2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadela Dwi Aprilia Putri

NPM : 1611031066

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2015-2018)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 16 November 2022
Penulis



Fadela Dwi Aprilia Putri

RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan nama lengkap Fadela Dwi Aprilia Putri dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 April 1998. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Basaruddin dan Ibu Bektining Saputri. Penulis memulai pendidikannya di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah pada tahun 2003-2004. Lalu penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Rawa Laut pada tahun 2004-2010. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2013, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif di beberapa organisasi internal kampus diantaranya Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) FEB Unila, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB Unila sebagai anggota periode 2016-2017.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat teriring salam selalu disanjungagungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan sebuah karya sederhana ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

Ayahanda Basaruddin dan Ibunda Bektining Saputri

Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan doa disepanjang langkahku, nasihat untuk kebaikanku, dan arti dari segala makna hidup yang bisa membuatku bisa menjadi orang yang lebih kuat hingga sampai dititik ini. Semoga Allah seantiasa memberikan Rahmat dan perlindungan di dunia dan akhirat, Aamiin.

Kakak-ku tersayang,

Fanisa Eki Gradiana Putri

Terimakasih atas semangat serta do'a yang tidak pernah putus.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung.

MOTTO

“Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik”

(Ali bin Abi Thalib)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2015-2018)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, do'a, bantuan, serta semangat selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan motivasi, dan sangat peduli kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian, waktu, tenaga, dan pikiran yang tercurahkan selama membimbing penulis.

4. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas ketersediaannya memberikan waktu, bimbingan, serta saran yang bermanfaat selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Ak., CA. selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh staf akademik, administrasi, tata usaha, para pegawai serta staf keamanan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Basaruddin dan Ibunda Bektining Saputri yang memberikan kasih sayang yang tulus, doa tiada henti, dukungan serta nasihat dalam pencapaian cita-cita. Terimakasih untuk segala pengorbanan dan kepercayaan yang telah diberikan.
10. Kakakku tersayang, Fanisa Eki Gradiana Putri, yang selalu memberikan do'a dan semangat, serta menghibur dikala sedih.
11. Seluruh keluarga besarku, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas doa, dukungan, motivasi, serta nasihat yang telah kalian berikan kepadaku.

12. Sahabat-sahabatku yang sangat kukasihi, Anggun Novitasari, Puti Salsabil, Bella Febriyanti, Muhammad Derra Prasetya, dan Andryan Marcellino.
13. Teman-teman Akun Cuy 2016 yang telah kebersamai dan saling mendukung selama menjalani masa perkuliahan.
14. Keluarga KKN Desa Karang Rejo, Yesi, Nadya, Erisca, Adam, Rafie, Fikram. Terimakasih untuk kerjasama, pengalaman, momen-momen yang tak terlupakan selama 40 hari dan kekeluargaan yang sangat erat terjalin. Serta terimakasih untuk Kepala Desa Karang Rejo serta paman-paman jajaran pengurus Desa Karang Rejo yang telah menerima kami dengan baik dan menjadikan kami bagian dari keluarga Karang Rejo.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala dukungan dan doa bagi keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandarlampung, 16 November 2022
Penulis,

Fadela Dwi Aprilia Putri

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Manfaat Teoritis	14
1.4.2 Manfaat Kebijakan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 <i>Human Capital Theory</i>	15
2.1.2 Pembangunan Manusia	16
2.1.3 Kemiskinan	18
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	23
2.1.6 Pengeluaran Pemerintah.....	24
2.1.7 Belanja Fungsi Pendidikan.....	25
2.1.8 Belanja Fungsi Kesehatan	26
2.1.9 Belanja Modal	27
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Penelitian	32
2.4 Pengembangan Hipotesis	33
2.4.1 Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	33
2.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia	34
2.4.3 Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	34
2.4.4 Pengaruh Belanja Fungsi Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	35

2.4.5	Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia...	36
-------	---------------------------------------------------------------	----

III.	METODELOGI PENELITIAN.....	38
3.1	Populasi dan Sampel.....	38
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	38
3.3	Transformasi Data.....	39
3.4	Deteksi <i>Outlier</i>	39
3.5	Definisi dan Pengukuran Variabel.....	40
3.5.1	Variabel Dependen.....	40
3.5.2	Variabel Independen.....	41
3.6	Metode Analisis Data.....	43
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	43
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	43
3.6.3	Model Penelitian.....	46
3.6.4	Pengujian Hipotesis menggunakan Analisis Regresi Berganda...	46
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1	Hasil Penelitian.....	49
4.1.1	Populasi dan Sampel.....	49
4.1.2	Statistik Deskriptif.....	50
4.2	Proses Perbaikan Data.....	52
4.2.1	Deteksi <i>Outlier (Boxplot)</i>	52
4.2.2	Transformasi Data.....	56
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	57
4.3.1	Uji Normalitas.....	57
4.3.2	Uji Multikolinearitas.....	58
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	59
4.3.4	Uji Autokorelasi.....	60
4.4	Model Regresi Linier Berganda.....	60
4.5	Pengujian Hipotesis.....	62
4.5.1	Uji Statistik F.....	62
4.5.2	Uji Statistik t.....	63
4.5.3	Koefisien Determinasi (R^2).....	69
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	71
5.3	Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan IPM di Indonesia, DKI Jakarta dan Papua 2015-2018.....	2
Tabel 2.1 Kategori Indeks Pembangunan Manusia.....	18
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Hasil Pengambilan Sampel	49
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	58
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas.....	59
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi.....	60
Tabel 4.7 Model Regresi Linier Berganda.....	60
Tabel 4.8 Uji Statistik F	62
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	68
Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2015-2018.....	3
Gambar 1.2 Capaian Indeks Pembangunan Manusia antar pulau di Indonesia tahun 2015-2018.	4
Gambar 1.3 Persentase Kemiskinan antar pulau di Indonesia tahun 2015-2018....	5
Gambar 1.4 Persentase pertumbuhan ekonomi antar pulau di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2018.....	7
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	32
Gambar 4.1 Boxplot: Indeks Pembangunan Manusia.....	53
Gambar 4.2 Boxplot: Tingkat Kemiskinan	53
Gambar 4.3 Boxplot: Pertumbuhan Ekonomi	54
Gambar 4.4 Boxplot: Belanja Fungsi Pendidikan.....	55
Gambar 4.5 Boxplot: Belanja Fungsi Kesehatan	55
Gambar 4.6 Boxplot: Belanja Modal	56
Gambar 4.7 Uji Normalitas P-Plot.....	57

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga dari keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Saat ini Indeks Pembangunan Manusia Indonesia telah masuk dalam kategori level pembangunan manusia yang tinggi, namun masih terdapat kesenjangan pembangunan manusia antar daerah, Provinsi yang pernah masuk dalam kategori level pembangunan manusia rendah pada Kawasan Timur Indonesia adalah Papua sedangkan Indeks Pembangunan level tinggi di Indonesia ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta. Berikut perbandingan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Papua tahun 2015-2018:

Tabel 1.1 Perbandingan IPM di Indonesia, DKI Jakarta dan Papua 2015-2018

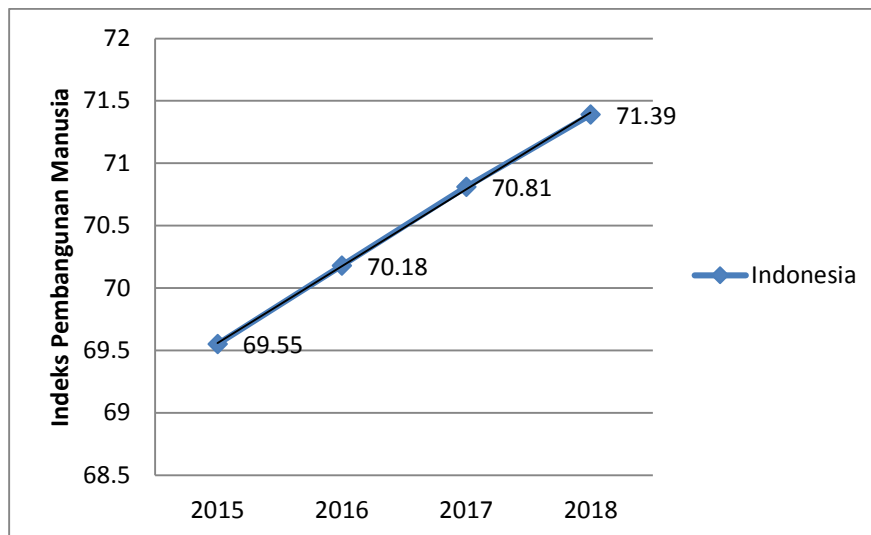
Tahun	Indeks Pembangunan Manusia		
	Indonesia	DKI Jakarta	Papua
2015	69,55	78,99	57,25
2016	70,18	79,60	58,05
2017	70,81	80,06	59,09
2018	71,39	80,47	60,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga berubah dari kategori rendah menjadi sedang yaitu pada tahun 2018 mengalami peningkatan 0,97 poin, hal ini terjadi karena adanya peningkatan aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan juga standar hidup layak pada Provinsi Papua. Namun, IPM Provinsi Papua masih mengalami perbedaan yang cukup jauh dengan IPM Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta dimana perbedaannya mencapai 20 poin. Serta kesenjangan pembangunan manusia antar kabupaten dan kota yang paling tinggi di Indonesia terjadi di Provinsi Papua. Kesenjangan ini terlihat dari perbedaan capaian antara ibukota Provinsi Papua, Jayapura dengan Kabupaten Nduga. Kesenjangan tersebut bahkan mencapai 50,16 poin.

Saat ini Indeks Pembangunan Manusia menurut Badan Pusat Statistik mengacu pada pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dilihat dari 3 dimensi utama dan indikatornya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator angka harapan hidup pada waktu lahir, dimensi pengetahuan dengan indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, serta dimensi standar hidup yang layak dengan indikator pengeluaran perkapita disesuaikan. Selain itu juga IPM dipengaruhi oleh

faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, upah minimum, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Berikut Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2015-2018:

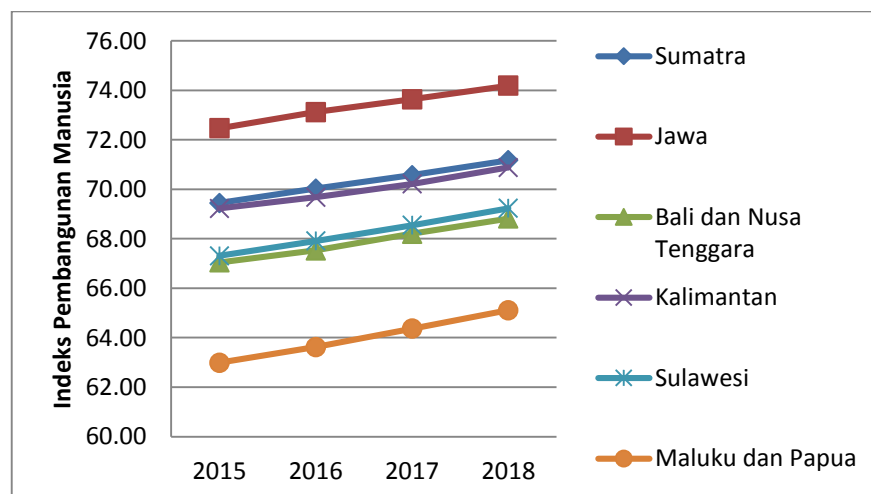


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2015-2018.

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia sebesar 69,55 lalu meningkat pada tahun 2016 sebesar 70,18, tahun 2017 sebesar 70,81, dan tahun 2018 sebesar 71,39. Meskipun IPM di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun menurut data Badan Pusat Statistik masih banyak Kabupaten dan Kota yang mengalami kemiskinan dengan persentase yang cukup tinggi hingga menyentuh angka 40 persen pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Deiyai sebesar 45,74 persen dan Kabupaten Lanny Jaya sebesar 41,57 persen.

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), kemajuan pencapaian IPM di tingkat nasional sebenarnya menyembunyikan fakta bahwa kesenjangan antar Provinsi masih terjadi. Kesenjangan indeks pembangunan manusia antar Provinsi dan kabupaten masih terjadi sepanjang 2016, ini dikarenakan pada tahun 2016 disparitas IPM antar daerah cukup tinggi dan variatif, yaitu terdapat 12 Provinsi memiliki IPM kategori tinggi, 21 Provinsi kategori sedang, dan 1 Provinsi kategori rendah, yaitu Provinsi Papua (Tempo.co, 2017). Provinsi dengan IPM yang rendah sebagian besar berada pada Kawasan Timur Indonesia, hal ini disayangkan karena peningkatan yang cukup signifikan pada Kawasan Barat Indonesia juga diikuti oleh kesenjangan dan perbedaan di Kawasan Timur Indonesia. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dengan membandingkan pembangunan IPM di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, berikut perbandingan capaian Indeks Pembangunan Manusia antar pulau di Indonesia tahun 2015-2018:

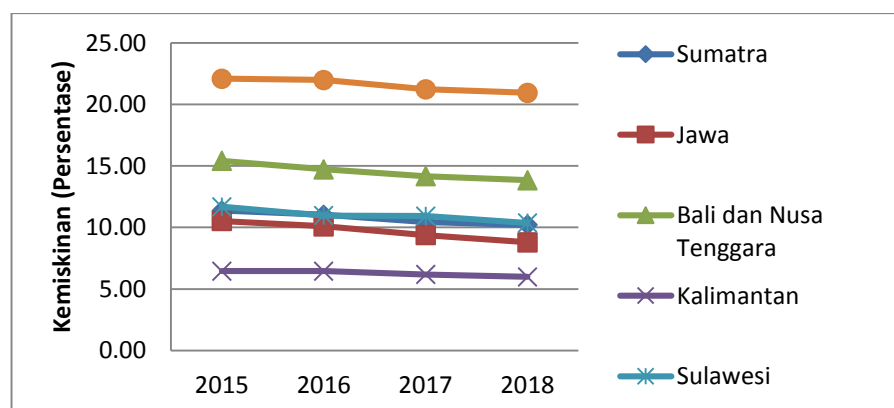


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Gambar 1.2 Capaian Indeks Pembangunan Manusia antar pulau di Indonesia tahun 2015-2018.

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa terdapat kesenjangan capaian IPM di wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia, yakni pulau Jawa dengan pulau Papua dan Maluku. Untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di Indonesia maka dibutuhkan pemerataan pembangunan. Dengan adanya pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut (Putra dan Ulupui, 2015).

Kemiskinan merupakan masalah yang cukup serius dalam proses pembangunan manusia. Sampai saat ini masalah kemiskinan belum dapat teratasi di belahan dunia manapun. Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks, bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan, sehingga kebutuhan yang lainnya seperti kesehatan dan pendidikan akan terabaikan. Hal tersebut menjadikan gap atau celah pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik (Mirza, 2012). Berikut perbandingan persentase kemiskinan antar pulau di Indonesia tahun 2015-2018:



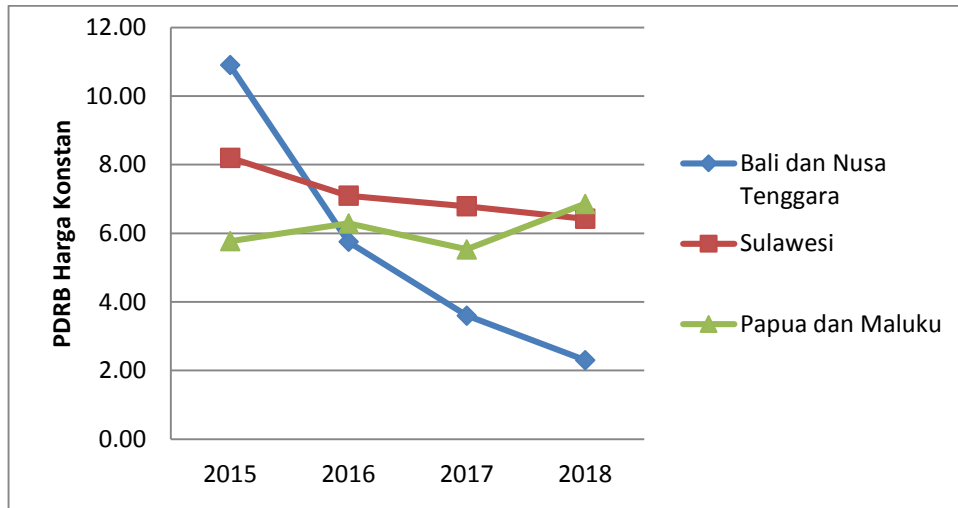
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Gambar 1.3 Persentase Kemiskinan antar pulau di Indonesia tahun 2015-2018.

Berdasarkan Gambar 1.3 terlihat bahwa secara keseluruhan tingkat kemiskinan di Indonesia bergerak menurun hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,17 persen dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Pulau Kalimantan memiliki persentase kemiskinan terendah dan Maluku dan Papua memiliki persentase kemiskinan tertinggi sepanjang tahun 2015-2018. Papua menjadi peringkat pertama persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia Timur, dimana peringkat kedua adalah Papua Barat dan peringkat ketiga adalah Nusa Tenggara Timur. Tingginya tingkat kemiskinan di pulau Maluku dan Papua menurut BPS dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, rendahnya kesehatan, terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebutuhan dasar seperti makanan, serta minimnya infrastruktur yang kurang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2010). Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata akan membawa pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Selain pertumbuhan yang tinggi pembangunan daerah harus juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Setiap daerah atau wilayah pada dasarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya (Raswita & Made, 2013). Berikut perbandingan persentase pertumbuhan

ekonomi menggunakan PDRB atas dasar Harga Konstan 2010 antar pulau di Indonesia tahun 2015-2018:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Gambar 1.4 Persentase pertumbuhan ekonomi antar pulau di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2018.

Berdasarkan Gambar 1.4 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami penurunan yang cukup ekstrim setiap tahunnya, hal ini dikarenakan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terus-menerus mengalami gempa setiap tahunnya yang mempengaruhi harga beberapa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, ekspor yang semakin menurun dan impor yang melonjak naik juga menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi melemah.

Sejak Indonesia menggunakan IPM untuk menghitung kualitas manusianya, nilai IPM pada Provinsi Papua selalu lebih rendah dari provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Nilai IPM di Papua yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk adalah faktor dominan yang perlu menjadi prioritas

utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (Baeti, 2013). Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, sedangkan kesehatan dianggap dapat meningkatkan produktivitas manusia. Oleh karena itu, mutu pendidikan dan mutu kesehatan yang buruk akan mempengaruhi kualitas manusia dan mempengaruhi tinggi rendahnya nilai IPM di Provinsi Papua.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai aspek penting dalam pembangunan. Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan tentang “mencerdaskan kehidupan bangsa,” yang terkait dengan pendidikan. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tertuang di dalam UU Nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD”.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang perlu menjadi prioritas penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan meningkatnya mutu pendidikan maka penduduk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Rendahnya mutu pendidikan menyebabkan sulitnya IPM di Papua meningkat, hal ini dikarenakan sumber daya manusia serta jumlah tenaga pendidik yang masih minim, akibatnya banyak penduduk yang tidak bisa

merasakan sekolah dan mendapatkan pelajaran. Selain masalah minimnya tenaga pendidik, kurangnya sekolah di setiap kabupaten dan infrastruktur yang masih buruk menjadi penghambat anak-anak di Provinsi Papua mendapatkan pendidikan. Kenyataan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya rata-rata lama sekolah di Papua yang rendah.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap orang karena setiap aspek kehidupan berhubungan dengan kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga mendukung keberhasilan dalam pembangunan nasional. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Dalam upaya mendukung pembangunan di bidang kesehatan, diperlukan tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan yang sangat penting untuk menunjang kesehatan masyarakat. Untuk pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 menyebutkan bahwa “besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji”.

Pemerintah daerah menjalankan sistem desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus masalah, kebutuhan serta sumber daya rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak serta kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat yang berkembang di daerah.

Sehubungan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, maka daerah perlu menggunakan dana yang dimilikinya untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, salah satunya dengan mengalokasikan ke dalam belanja modal. Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan (Halim, 2008). Belanja modal memiliki peranan yang sangat penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana publik. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi.

Penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia yang dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, dan belanja modal telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM (Mirza, 2012; Adelfina & Jember, 2016) dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif terhadap IPM (Dewi *et al*, 2017). Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM (Mirza, 2012; Adelfina

& Jember, 2016) dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM (Dewi *et al*, 2017). Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM (Sanggalorang *et al*, 2015; Kahang, 2016) dan Belanja Fungsi Pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM (Safitri, 2016; Pake *et al*, 2018). Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM (Safitri, 2016; Pake *et al*, 2018) dan Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh negatif terhadap IPM (Sanggalorang *et al*, 2015; Kahang, 2016; Fahmi, 2018). Belanja Modal berpengaruh positif terhadap IPM (Mirza, 2012; Setiawan & Budiana, 2015) dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap IPM (Sastri & Latrini, 2019).

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada periode waktu penelitian yaitu tahun 2015-2018, serta sampel penelitian yaitu pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mana hingga 2018 masih terdapat perbedaan nilai IPM yang masih berada jauh dari IPM pada Kabupaten/Kota di Kawasan Barat Indonesia, bahkan Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia termasuk dalam kategori nilai IPM rendah ($IPM < 60$).

Faktor – faktor yang memengaruhi capaian IPM di setiap wilayah berbeda – beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik suatu wilayah dengan wilayah lain. Provinsi di Kawasan Timur Indonesia merupakan Provinsi dengan banyak Kabupaten/Kota yang tertinggal pembangunannya, masalah utama yang banyak terjadi pada Kawasan Timur Indonesia adalah kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan merupakan masalah yang banyak terjadi di Provinsi pada Kawasan Timur Indonesia yang mempengaruhi nilai IPM, ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya akan mempengaruhi kebutuhan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.

Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pada mutu pendidikan, maka masyarakat akan kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, hal ini juga mempengaruhi para pelaku usaha yang kesulitan dalam memenuhi sumber daya manusia sehingga kesulitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, infrastruktur seperti jalan dan jembatan pada Kawasan Timur Indonesia belum memadai sehingga sulit menghubungkan wilayah-wilayah sentra produksi, dengan adanya pembangunan infrastruktur diharapkan akan mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang akan meningkatkan nilai IPM.

Kemudian, salah satu unsur penting dalam keberhasilan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah dengan baik yaitu secara efektif dan efisien. Dalam mewujudkan daerah dengan kualitas manusia yang tinggi, pemerintah daerah menggunakan APBD-nya untuk membiayai pembangunan dan pelayanan seperti pada sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan infrastruktur daerah. Rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah mengakibatkan rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat sehingga tidak mampu meningkatkan IPM. Dalam penelitian ini dapat diketahui apakah dana belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, dan belanja modal telah digunakan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat untuk meningkatkan IPM yaitu dengan melihat apakah dana belanja daerah berpengaruh terhadap IPM Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Kemiskinan (X_1) berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi (X_2) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
3. Apakah Belanja Fungsi Pendidikan (X_3) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
4. Apakah Belanja Fungsi Kesehatan (X_4) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
5. Apakah Belanja Modal (X_5) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
6. Apakah Tingkat Kemiskinan (X_1), Pertumbuhan Ekonomi (X_2), Belanja Fungsi Pendidikan (X_3), Belanja Fungsi Kesehatan (X_4), Belanja Modal (X_5) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui apakah Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian terdahulu mengenai kajian atas pengaruh tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia.

1.4.2 Manfaat Kebijakan

Memberikan bahan masukan bagi pengambil kebijakan pembangunan daerah dalam rangka penyempurnaan pemerintahan daerah, terutama yang membidangi program perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan, serta sebagai bahan perencanaan strategi kedepan bagi pengambilan keputusan khususnya dalam kaitan pembangunan manusia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Human Capital Theory*

Human capital secara bahasa tersusun atas dua kata dasar yaitu manusia dan kapital (modal). Modal yang dimaksudkan adalah nilai tambah dalam diri manusia. Teori *Human Capital* diperkenalkan oleh Theodore W. Schultz tahun 1961 dalam pidatonya yang berjudul *Investment in Human Capital* menyatakan bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal atau kapital sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya seperti mesin, teknologi, uang dan material. Teori Human Capital menekankan bahwa pendidikan, pengetahuan, kesehatan, dan keterampilan adalah bentuk bentuk modal, yaitu modal manusia.

Todaro (2000) mengungkapkan bahwa *human capital* dapat diukur melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan pelatihan dapat menjadi nilai tambah seorang manusia. Hal ini dapat dijelaskan apabila semakin tinggi pendidikan seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatihan maka kemampuan dan keterampilan yang dimiliki semakin tinggi. Sementara itu, kesehatan merupakan bidang yang saling terkait dengan pendidikan. Pendidikan tinggi yang dimiliki tanpa adanya tubuh yang sehat tidak akan menaikkan produktivitas, pendidikan yang tinggi juga dapat memengaruhi tingkat kesadaran kesehatan seseorang.

Indikator pengukuran kesehatan dalam *human capital* adalah nilai angka harapan hidup. Nilai angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

2.1.2 Pembangunan Manusia

2.1.4.1 Konsep Pembangunan Manusia

Menurut *Human Development Report* (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Sebagaimana dari *Human Development Report* (1995), sejumlah hal penting dalam pembangunan manusia diantaranya:

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka, oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

2.1.4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia mengacu pada pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dilihat dari tiga dimensi dasar dan indikatornya yaitu:

- a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator angka harapan hidup pada waktu lahir.
- b. Dimensi pengetahuan dengan indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah.
- c. Dimensi standar hidup yang layak dengan indikator pengeluaran perkapita disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara atau daerah itu maju, berkembang maupun tertinggal, serta untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Adapun Komponen Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang.

3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

4. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan digunakan untuk mengukur standar hidup layak yaitu kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu.

Tabel 2.1 Kategori Indeks Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Kategori
$IPM < 60$	Rendah
$60 \leq IPM < 70$	Sedang
$70 \leq IPM < 80$	Tinggi
$IPM \geq 80$	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

2.1.3 Kemiskinan

Menurut *World Bank* (2000), definisi dari kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*). Sedangkan inti permasalahan pada kemiskinan adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri. Dalam teori ekonomi, semakin banyak barang yang dikonsumsi berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan seseorang. Tingkat kesejahteraan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses sumber daya yang tersedia (barang yang

dikonsumsi). Kemampuan akses sumber daya yang tersedia ini dapat diukur melalui jumlah pendapatan ataupun pengeluaran seseorang. Jika definisi kemiskinan dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kesejahteraan atau dengan kata lain kekurangan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kekurangan akses merupakan kurangnya pendapatan seseorang.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun nonmakanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Menurut Hartomo & Aziz (1997) penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber daya alam, terbatasnya lapangan pekerjaan, keterbatasan modal, beban keluarga.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis

Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik adalah Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, Badan Pusat Statistik menggunakan 3 ukuran kemiskinan yaitu:

1. Head Count Index

Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

2. Poverty Gap Index

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

3. Poverty Severity Index

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2010), Pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya.

Lamboturuan dan Hidayat (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Menurut Todaro dan Smith (2006), terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.

- b. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- c. Kemajuan teknologi, berupa cara-cara baru atau perbaikan cara-cara lama mengenai pekerjaan.

2.1.4.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan atau laju pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan dan kegunaan Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk memperoleh gambaran secara umum maupun rinci (sektoral) tentang keadaan perekonomian suatu daerah. Penyajian yang berkesinambungan dari tahun ke tahun akan memberikan gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemakmuran, tingkat inflasi, maupun deflasi gambaran struktur perekonomian suatu daerah dan berguna bagi pemerintah sebagai acuan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan.

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB dapat diartikan ke dalam tiga pengertian yaitu :

- a. Menurut pengertian produksi

PDRB adalah sejumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah (region) dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

- b. Menurut pengertian pendapatan

PDRB adalah sejumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah atau daerah dalam

jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak tidak langsung lainnya.

c. Menurut pengertian pengeluaran

PDRB adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi Pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stock dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor).

Menurut Badan Pusat Statistik, penghitungan nilai PDRB dapat dilakukan dengan 2 jenis harga, yaitu :

1. Menggunakan Pendekatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Pendekatan ini disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. Metode ini digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah.

2. Pendekatan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Pendekatan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun dasar. Metode ini digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun.

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tugas utama dari anggaran adalah

mengendalikan aktivitas fiskal pemerintah, mengkaji tindakan sebelumnya dan mengetahui program pemerintah di masa yang akan datang. Anggaran daerah mengetahui posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah.

Menurut Saragih (2003: 127), APBD merupakan suatu gambaran atau tolok ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak-pajak daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.6 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang bagus dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di segala bidang ekonomi. IPM dapat diwujudkan melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah adalah membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 2004).

2.1.7 Belanja Fungsi Pendidikan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengeluaran pemerintah pada fungsi pendidikan dapat membangun sarana dan sistem pendidikan yang lebih baik yang akan mempengaruhi angka pendidikan berupa rata-rata lama sekolah, semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan

keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu untuk meningkatkan standar ekonominya yang akan membantu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belanja fungsi pendidikan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tertuang di dalam UU Nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa "dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD".

2.1.8 Belanja Fungsi Kesehatan

Ketentuan pasal 171 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menjadikan alokasi belanja di bidang kesehatan sesuatu yang mutlak dipenuhi (mandatory spending). Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 5% (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diluar gaji, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji. Tujuan dari pembangunan bidang kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan yang terus membaik.

Penggunaan anggaran di bidang kesehatan diharapkan seoptimal mungkin dapat termanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

2.1.9 Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud (Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005).

Menurut Halim (2007), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM (Mirza, 2012; Adelfina & Jember, 2016) dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif terhadap IPM (Dewi *et al*, 2017). Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM (Mirza, 2012; Adelfina & Jember,

2016) dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM (Dewi *et al*, 2017). Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM (Sanggolongan *et al*, 2015; Kahang, 2016) dan Belanja Fungsi Pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM (Safitri, 2016; Pake *et al*, 2018). Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM (Safitri, 2016; Pake *et al*, 2018) dan Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh negatif terhadap IPM (Sanggolongan *et al*, 2015; Kahang, 2016; Fahmi, 2018). Belanja Modal berpengaruh positif terhadap IPM (Mirza, 2012; Setiawan & Budiana, 2015) dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap IPM (Sastri & Latrini, 2019). Berikut adalah tabel ringkasan penelitian terdahulu:

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Adelfina dan I Made Jember (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005-2013.	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Belanja Daerah	Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia . Namun Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
2.	Denni Sulistio Mirza (2012)	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009.	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan elastisitas negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan elastisitas positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Novita Dewi (2017)	Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi	Dari hasil penelitian variabel Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4.	Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014)	Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Laju Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
5	Winsy A. Tarumingken g, Vekie A. Rimate, Tri Oldy Rotinsulu (2018)	Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara.	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: Belanja Modal, Tingkat Kemiskinan	Dari hasil penelitian variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
6	Septiana M. M. Sanggeloran g, Vekie A. Rimate, dan Hanly F.DJ. Siwu (2015)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara.	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah di Sektor	Hasil penelitian menunjukkan variabel Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan variabel Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan berpengaruh negatif dan

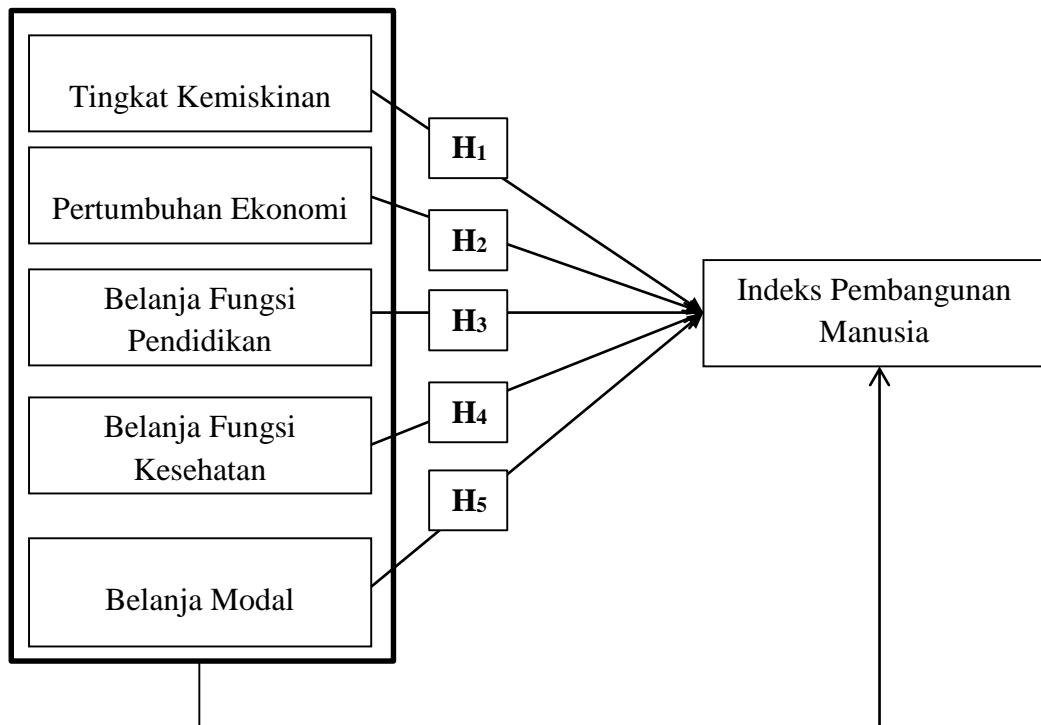
No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan	tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
7	Sal Diba Susen Pake, George M. V. Kawung, Antonius Y. Luntungan (2018)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Halmahera Utara.	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan	Variabel Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
8	Merang Kahang, Muhammad Saleh, dan Rachmad Budi Suharto (2016)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur.	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan	Berdasarkan hasil penelitian variabel Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
9	Intan Safitri (2016)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Pengeluaran	Hasil penelitian menunjukkan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Infrastruktur	
10	Gusi Bagus KOMPIANG Putra Setiawan dan Dewa Nyoman Budiana (2015)	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Intervening: Pertumbuhan Ekonomi	Dari hasil penelitian variabel Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
11	Sasti, I. A. T. P., & Latrini, M. Y. (2019).	Pengaruh Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: Alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal	Dari hasil penelitian variabel Alokasi Belanja Operasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
12	Anisa Fahmi (2018).	Pengaruh Good Governance, Belanja Fungsi Pendidikan Dan Kesehatan, dan PDRB Perkapita Terhadap IPM	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Independen: Good Governance, Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan, dan PDRB Perkapita	Good governance, belanja fungsi pendidikan, dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan belanja fungsi kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

Sumber: *Google Scholar* data diolah.

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan serta tujuan penelitian juga penelitian terdahulu yang telah di paparkan, maka berikut adalah gambar yang menunjukkan kerangka pikir dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan

Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Terdapat 3 hal yang menyebabkan kemiskinan, yaitu rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendapatan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Kemiskinan sangat berpengaruh terhadap pembangunan manusia, ketidakmampuan daya beli masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan akan mempengaruhi kebutuhan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan yang akan terabaikan dan dapat mempengaruhi indikator Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Mirza, 2012; Adelfina & Jember, 2016; Chalid & Yusuf, 2014; Tarumingkeng *et al.*, 2018). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₁ : Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan ekonomi adalah mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2010). Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata akan membawa pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Laju pertumbuhan ekonomi tidak langsung berdampak pada pendapatan masyarakat miskin, akan tetapi jika pemerintah dapat menggunakan manfaat dari pertumbuhan untuk membiayai pelayanan kesehatan dan akses pendidikan maka masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat ganda dari pertumbuhan pendapatan tersebut.

Hasil Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Chalid & Yusuf, 2014; Mirza, 2012; Adelfina & Jember, 2016). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₂ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.4.3 Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Belanja fungsi pendidikan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan

kedinasan. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tertuang di dalam UU No. 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa "dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD". *Human Capital Theory* menyatakan pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dengan melakukan investasi pada pendidikan maka akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keterampilannya akan meningkatkan produktivitas kerja sehingga diharapkan akan meningkatkan pendapatan atau gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan yang dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Sanggelorang *et al.*, 2015; Kahang *et al.*, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₃ : Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.4.4 Pengaruh Belanja Fungsi Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap orang karena setiap aspek kehidupan berhubungan dengan kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan

sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga mendukung keberhasilan dalam pembangunan nasional. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat yang akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Safitri, 2016; Pake *et al.*, 2018). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₄ : Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.4.5 Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kegiatan belanja modal pemerintah daerah akan menghasilkan dibangunnya berbagai fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Fasilitas tersebut akan memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Untuk meningkatkan kemajuan daerah maka diperlukan pengalokasian belanja modal yang lebih besar untuk perbaikan bangunan dan infrastruktur terutama fasilitas jalan dan jembatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat

merasa nyaman dan dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan efektif dan efisien.

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Mirza,2012; Setiawan & Budiana, 2015). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₅ : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kawasan Timur Indonesia meliputi 13 Provinsi yang mencakup 185 pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kelengkapan data dari tahun 2015-2018. Penelitian ini tidak menyertakan Provinsi sebagai sampel dikarenakan perbedaan data anggaran antar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang cukup jauh. Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki data Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan PDRB harga konstan selama tahun 2015-2018.
2. Memiliki data Belanja Fungsi Pendidikan dan Belanja Fungsi Kesehatan selama tahun 2015-2018.

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 156 pemerintah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dalam purposive sampling. Maka penelitian ini memiliki 156 populasi penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Belanja Modal dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kawasan Indonesia Timur bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) periode Tahun Anggaran 2015-2018 melalui akses website www.bpk.go.id
2. Data Belanja Fungsi Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten dan Kota di Kawasan Indonesia Timur tahun 2015-2018 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI melalui akses website <http://djpk.depkeu.go.id> .
3. Data Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB harga konstan), dan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015-2018 yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik www.bps.go.id .

3.3 Transformasi Data

Transformasi data merupakan salah satu cara menormalkan data dengan merubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, namun tidak mengubah nilai asli data sehingga data dapat memenuhi kriteria uji asumsi klasik (Ghozali, 2016). Ada beberapa jenis cara transformasi data, antara lain: Transformasi Square Root (Akar), Transformasi Logaritma, Transformasi Arcsin, Transformasi Square (Kuadrat), dan transformasi lainnya.

3.4 Deteksi *Outlier*

Outlier merupakan data yang memiliki nilai yang terlihat sangat berbeda jauh dibandingkan dengan observasi-observasi lainnya. Menurut Ghozali (2013), terdapat 4 penyebab timbulnya data *outlier* yaitu:

1. Kesalahan dalam menginput data,
2. Gagal dalam menspesifikasi adanya *missing value* dalam program komputer,
3. *Outlier* bukan merupakan anggota populasi yang diambil sebagai sampel, dan
4. *Outlier* berasal dari populasi yang diambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak berdistribusi normal.

Deteksi *outlier* pada penelitian ini menggunakan metode *Boxplot* atau yang juga dikenal sebagai diagram *box-and-whisker*. *Boxplot* adalah salah satu cara dalam statistik deskriptif untuk menggambarkan secara grafik dari data numeris. Dalam *boxplot* juga ditunjukkan nilai *outlier* dari observasi. Nilai yang berada di atas atau di bawah whisker (garis yang memperpanjang box) dinamakan nilai *outlier* atau data ekstrem.

3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel Dependen

3.5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia. IPM adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas hidup rata-rata suatu negara/daerah untuk tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu:

1. Indeks kesehatan diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir.
2. Indeks pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.

3. Indeks standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita disesuaikan.

Dalam penelitian ini pengukuran variabel IPM dilakukan dengan melihat angka capaian IPM tiap Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik.

3.5.2 Variabel Independen

3.5.2.1 Tingkat Kemiskinan

Menurut UNDP kemiskinan adalah kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Dalam penelitian ini variabel kemiskinan menggunakan rumus Head Count Index (HCI) yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) dengan rumus:

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

Keterangan:

a = 1

z = garis kemiskinan

y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...q), y_i < z

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

3.5.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2010). Pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan

ekonomi suatu bangsa dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, dengan rumus :

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan nilai laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada suatu wilayah yang didapatkan dari situs Badan Pusat Statistik.

3.5.2.3 Belanja Fungsi Pendidikan

Belanja pemerintah bidang pendidikan adalah besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total APBD yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan diwakili dengan jumlah pengeluaran untuk sektor pendidikan pada Realisasi APBD pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2018 yang didapatkan dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diukur dalam satuan rupiah.

3.5.2.4 Belanja Fungsi Kesehatan

Belanja fungsi kesehatan adalah besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total APBD yang dialokasikan untuk sektor kesehatan. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan diwakili dengan jumlah pengeluaran pembangunan untuk sektor kesehatan pada Realisasi APBD pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2018 yang didapatkan dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diukur dalam satuan rupiah.

3.5.2.5 Belanja Modal

Menurut Halim (2007), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Dalam penelitian variabel belanja modal menggunakan data realisasi belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia, diukur dalam satuan rupiah.

3.6 Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat yaitu lolos asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi (skewness). Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model dalam penelitian ini. Pengujian ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi tidak terdapat multikolenieritas, heteroskedastisitas, autokolerasi serta memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal (Ghozali, 2016). Pengujian ini meliputi:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen memiliki distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Untuk menguji normalitas data, dapat dilihat pada grafik *probability plot*. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun, jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi tidak normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016).

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolenieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolenieritas di dalam

model adalah dengan menggunakan tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/tolerance$) (Ghozali, 2013). Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolonieritas terhadap data yang diuji. Sebaliknya, jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi multikolonieritas terhadap data yang di uji.

3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2013). Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji Spearman's Rho. Uji ini mengkorelasikan variabel independen dengan residualnya. Jika nilai signifikan yang dihasilkan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas

dari autokorelasi (Ghozali, 2013). Menurut Sunyoto (2013), dalam menentukan ada atau tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW di bawah -2.
2. Tidak terjadi masalah autokorelasi jika nilai DW berada di antara -2 dan +2.
3. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2.

3.6.3 Model Penelitian

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan bantuan *Software SPSS 23 (Statistical Package for the Social Science)*. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan analisis regresi berganda yang diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1TK + \beta_2PE + \beta_3BFP + \beta_4BFK + \beta_5BM + e$$

Keterangan:

Y	= Indeks Pembangunan Manusia
α	= Konstanta
β_1 - β_5	= Koefisien Regresi
TK	= Tingkat Kemiskinan
PE	= Pertumbuhan Ekonomi
BFP	= Belanja Fungsi Pendidikan
BFK	= Belanja Fungsi Kesehatan
BM	= Belanja Modal
e	= Standar Error

3.6.4 Pengujian Hipotesis menggunakan Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Pengujian yang digunakan dalam analisis ini adalah uji kelayakan model regresi (uji statistik F), uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), dan uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*).

3.6.4.1 Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2013), uji goodness of fit (uji kelayakan model) dilakukan untuk melihat apakah model penelitian yang diberikan layak untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Hal ini dapat diukur dari nilai statistik F dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. Jika tingkat signifikansi $> 0,05$ atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian.
2. Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ atau bila nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan nilai α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian.

3.6.4.2 Uji Statistik t

Pengujian signifikansi parameter individual ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi yang menggunakan program SPSS dengan membandingkan *p-value* masing – masing variabel independen dengan taraf sig $\alpha = 0,05$. Apabila *p-value* lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$, maka hipotesisnya diterima yang artinya variabel independent tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya

bila *p-value* lebih besar daripada $\alpha = 0,05$, maka hipotesisnya tidak diterima yang artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.

3.6.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R^2*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangatlah terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu menunjukkan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki variabel dependen (Ghozali, 2016). Semakin besar R^2 maka menunjukkan semakin kuat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Indeks Pembangunan Manusia, faktor-faktor tersebut yaitu Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan, dan Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2015-2018). Jumlah sampel sebanyak 548 observasi yang berasal dari 156 Kabupaten/Kota yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Setelah dianalisis menggunakan regresi linier berganda, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2018.
2. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2018.
3. Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2018.

4. Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2018.
5. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2018.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya data Kabupaten/Kota yang tidak lengkap yaitu pada data kemiskinan, belanja fungsi pendidikan dan belanja fungsi kesehatan.
2. Periode penelitian yang tidak panjang yakni hanya empat tahun dan variabel penelitian yang hanya terbatas pada lima variabel sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini cukup sedikit jumlahnya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas sampel penelitian dengan menambahkan populasi penelitian pada Kabupaten/Kota di Kawasan Barat Indonesia seperti pada Pulau Sumatra, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan hasil yang lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau mengganti variabel independen lain yang sekiranya mempengaruhi IPM seperti tingkat pengangguran, upah minimum, dan pendapatan daerah. Selain itu juga disarankan untuk menambah tahun penelitian untuk melihat pengaruh jangka panjang hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Adelfina & Jember, I. M. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005-2013. FE Universitas Udayana.
- Adityowati, P. (2017, 18 April). Kesenjangan Pembangunan Manusia Masih Terjadi. <https://bisnis.tempo.co/read/867009/bps-kesenjangan-pembangunan-manusia-masih-terjadi>. Diakses pada 28 Februari 2020.
- Ayobandung.com. (2019, 12 November). Hari Kesehatan Nasional: Persebaran Fasilitas Kesehatan Indonesia Tidak Merata. <https://ayobandung.com/read/2019/11/12/69934/hari-kesehatan-nasional-persebaran-fasilitas-kesehatan-indonesia-tidak-merata>. Diakses pada 20 Mei 2021.
- Badan Pusat Statistik. (2013). Indeks Pembangunan Manusia 2013.
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* vol. 2 (3).
- BPPK. (2011). Memahami Konsep Modal Manusia (*Human Capital Concept*). <http://www.bppk.depkeu.go.id>, diakses 10 Februari 2021.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. *Jurnal ekonomi*, 22(2), 1-12.
- Dewi, N., Yusuf, Y. & Iyan, R.Y. (2017). Pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau (*Doctoral dissertation*, Riau University).
- Fahmi, A. (2018). Pengaruh *Good Governance*, Belanja Fungsi Pendidikan Dan Kesehatan, Dan PDRB Perkapita Terhadap IPM. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 2(1), 23-34.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A. (2008). Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hartomo dan, Aziz. 1997. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta : Bumi Aksara
- Kahang, M., & Suharto, R. B. (2017). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indkes pembangunan manusia di kabupaten kutai timur. In Forum Ekonomi (Vol. 18, No. 2, pp. 130-140).
- Lumbantoruan, Pratiwi, E. & Hidayat, P. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi-Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 2. No. 2.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Makalah Disampaikan dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Economics Development Analysis Journal, 1 (2).
- Nurkholis, A. (2018). Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: *Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory*.
- Nursiah, C. and Yusbar, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi, 22(2).
- Pake, S. D. S., Kawung, G. M., & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 18(4).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(2015), 863-877.

Raswita, N. P. M. E., & Utama, M. S. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(3), 44429.

Safitri, I. (2016). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 66-76.

Sanggalorang, S., Rimate, V. & Siwu, H. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3).

Saragih, J. P., & Khadafi, M. S. (2003). Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi. *Ghalia Indonesia*.

Sasti, I. A. T. P., & Latrini, M. Y. (2019). Pengaruh Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1632-1659.

Schultz, Theodore, W (1961), *Investment in Human Capital, The American Economics Review*, No. 51, March 1961.

Setiawan, G. B. K. P., & Budiana, D. N. (2015). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(10), 44577.

Sukirno, S., (2004). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sukirno, S. (2010). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.

Sukirno, S. (2014). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tarumingkeng, W. A., Rumat, V. A., & Rotinsulu, T. O. (2021). Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 82-95.
- Todaro, M. P. (2006). *Economic Development. Seventh Edition, New York, Addison Wesley Longman, Inc.*
- Todaro, M. P. (2000). *Economic Development, Seventh Edition. New York: University Addison Mesley.*
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi di dunia ketiga Edisi 4*. Jakarta: Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar.
- Tolo, E. Y. S. (2019, 22 Februari). Kesenjangan Infrastruktur di Timur. <https://kolom.tempo.co/read/1178263/kesenjangan-infrastruktur-di-timur>. Diakses pada 20 Mei 2021
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- United Nations Development Program. 1990. Human Development Report 1990. United Nations Development Program, New York.*
- United Nations Development Program. 1995. Human Development Report 1995. United Nations Development Program, New York.*
- World Bank. 2000. *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty. The World Bank. Washington, D.C.*
- www.bpk.go.id
- www.bps.go.id
- www.djpk.kemenkeu.go.id